



Gajian PNS Mundur

YOGYA (MERAPI)- Pembayaran gaji PNS di lingkungan Pemkot Yogyakarta untuk bulan Oktober diperkirakan mundur dari 2 Oktober menjadi 6 Oktober nanti. Pengunduran terjadi akibat libur bersama lebaran dari 29 September sampai 5 Oktober.

"Ini berlaku nasional, bukan hanya Yogya. Untuk Yogya sendiri, DAU (Dana Alokasi Umum) untuk gaji lebih dari Rp 23 miliar per bulan untuk sekitar 8.900 orang PNS," ujar Kasubid Pengelolaan Belanja Pegawai Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Yogyakarta Kristi Dewayani di Balaikota, Selasa (9/9).

Diutarakan, libur lebaran menyebabkan transfer DAU dari pemerintah pusat, termasuk untuk gaji PNS ikut mundur. Pasalnya, transfer DAU tersebut mengacu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan

Departemen Keuangan No 84 tahun 2007 tentang Tatacara Pencairan DAU. Berdasarkan aturan tersebut, transfer ke rekening kas umum daerah dilakukan pada awal hari kerja bulan bersangkutan.

"Hari kerja pertama bulan Oktober itu tanggal 6, karena libur lebaran sampai 5 Oktober. Jadi penggajiannya tetap tanggal 6 Oktober, kalau tidak ada perubahan aturan. Kita tidak bisa mengajukannya jadi tanggal 1, karena bank *off*. BPD Senopati tempat rekening kas daerah Kota Yogyakarta juga libur hari itu," paparnya.

Menurutnya, pemerintah akan mengadakan rapat koordinasi soal keuangan. Apabila terdapat petunjuk teknis baru soal penggajian, BPKD segera menyesuaikan diri. Tetapi, selama tidak ada petunjuk teknis yang baru, penggajian kemungkinan tetap diundur tanggal 6 Oktober. (W-8)-n

RAYAKAN LEBARAN DENGAN 'KANTONG KOSONG'

Penerimaan Gaji PNS DIY Terancam Molor

YOGYA (KR) - Penerimaan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di DIY terancam molor. Bahkan kemungkinan gaji baru dapat dibayarkan setelah cuti Lebaran. Akibatnya, para PNS akan merayakan Lebaran dengan 'kantong kosong' karena mereka juga tidak menerima tunjangan hari raya (THR).

Kemungkinan molornya pembayaran gaji PNS tersebut dikemukakan Kabid Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DIY, Drajat Ruswandono kepada KR, Selasa (9/9) terkait kapan pembayaran gaji PNS, karena pada tanggal 1 Oktober merupakan Hari Raya Idul Fitri. Sedangkan tanggal 2-5 Oktober masih dalam cuti bersama. "Seperti diketahui

cuti bersama sudah dimulai sejak tanggal 29 September hingga 5 Oktober. Saat itu, tidak ada aktivitas administrasi," ujarnya.

Menurut Drajat, jika dibayarkan sebelum tanggal 1 Oktober, atau menjelang cuti bersama, sangat kecil kemungkinan. Karena hal itu berarti dalam satu bulan (September) ada 2 kali pengeluaran gaji.

"Kita masih menunggu bagaimana keputusan pemerintah pusat. Bisa saja nanti ada keputusan presiden, sebagai jalan keluar, sehingga PNS bisa menikmati Lebaran karena gaji telah dibayarkan," ujarnya.

Hal senada diungkapkan Kasubbid Pengelolaan Belanja Pegawai BPKD Kota Yogyakarta Christy Dewayani. Sampai saat ini belum ada

petunjuk dari Pusat terkait pencairan gaji PNS bulan Oktober tersebut.

Padahal tanggal 29 September hingga 5 Oktober mendatang merupakan libur Lebaran bagi PNS. Sehingga kemungkinan, pembayaran gaji PNS mundur pada 6 Oktober mendatang, bertepatan dengan hari pertama masuk kerja PNS setelah libur Lebaran."

1. Wali
2. Waki
3. Sekr
4. Asist

"Jika sesuai jadwal, pencairan gaji Oktober seharusnya bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri yang jatuh tanggal 1 Oktober. Tapi ten-

tunya pada hari tersebut bank juga libur, jadi kemungkinannya kecil dicairkan pada waktu Hari Raya. Sementara transfer DAU dari pusat juga pada 6 September," ucap Christy di Balaikota, Selasa (9/9).

Hal tersebut juga mengacu pada peraturan Dirjen Perbendaharaan No 84/PB Tahun 2007 tentang tata cara pencairan DAU, bahwa Dirjen Perbendaharaan selaku kuasa Bendahara Umum melakukan pencairan dana melalui rekening kas umum negara dengan menerbitkan

SP2B ke gubernur, bupati dan walikota untuk rekening kas umum daerah pada awal hari kerja bulan berkenaan. "Jadi, ersepsi kami, yang juga sudah kami koordinasikan dengan pusat, bahwa hari kerja bulan berkenaan jatuh pada 6 Oktober," ujarnya.

Meski demikian, jika ada petunjuk teknis yang baru, pihaknya tentu akan mengikuti. Ditambahkan, untuk PNS Pemkot Yogyakarta yang sejumlah 8.900 orang, untuk gaji saja perbulan diperlukan dana sekitar Rp 23 miliar. (Jon/Ret)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 April 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005